

*Surat Kabar Harian "PIKIRAN RAKYAT", terbit di
Bandung, Edisi 7 November 2001*

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT LUAS

Oleh : Ki Supriyoko

"Ganti menteri ganti *beleid*"; nampaknya kalimat yang cukup khas ini tetap berlaku dalam dunia pendidikan kita. Sudah berkali-kali kita memiliki menteri pendidikan, kalau dihitung sejak Republik ini diproklamasikan sudah lebih dari 30 kali terjadi pergantian menteri pendidikan, dan dalam realitasnya sudah berkali-kali pula kita menerima kebijakan baru dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Apakah setiap ganti menteri pendidikan harus terjadi pergantian kebijakan? Tentu saja tidak; namun realitas yang sudah terjadi memang menjadi "*expost facto*" yang tidak terelakkan.

Realitasnya memang demikian; meski tidak selalu akan tetapi hampir setiap terjadi pergantian menteri pendidikan terjadi pula pergantian kebijakan. Dengan demikian kita tidak perlu heran kalau beberapa menteri memiliki "*educational mark*" masing-masing; contoh konkritnya Pak Nugroho Notosusanto dengan humanioranya, Pak Fuad Hassan dengan mutu dan relevansinya, Pak Wardiman Djojonegoro dengan *Link and Match*-nya, dan sebagainya.

Keadaan seperti itu tidaklah aneh dan tentu saja tidak salah karena setiap pimpinan lembaga memang berhak mengembangkan kebijakan yang diyakini tepat untuk mensukseskan tugasnya. Apabila dengan suatu kebijakan tertentu diyakini pendidikan nasional dapat lebih maju mengapa hal itu tidak ditempuh. Hal ini juga menunjukkan adanya kreativitas dan keberanian untuk meraih prestasi.

Memang, sisi negatifnya tentu ada kalau setiap ganti menteri terus berganti kebijakan. Apa itu? Keadaan ini mengesankan tidak adanya "*grand design*" untuk mengembangkan pendidikan nasional dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Konsep BBE

Beberapa saat setelah Prof. A. Malik Fadjar dilantik sebagai menteri pendidikan nasional di dalam Kabinet Gotong Royong maka segera menluncurlah konsep tentang *Broad-based Education* (BBE); dan sampai sekarang ini beliau dan para pejabat departemen pendidikan selalu mensosialisasi konsep BBE dalam berbagai

kesempatan. Nampaknya BBE inilah yang menjadi kebijakan baru dari departemen pendidikan nasional kita.

Pada dasarnya BBE merupakan pelaksanaan pendidikan yang berbasis pada masyarakat luas; adapun maksudnya adalah kebijakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sepenuhnya di-peruntukkan bagi lapisan masyarakat yang terbesar di negara kita. Bahwa dalam realitasnya aspirasi dan keinginan anggota masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sangatlah bervariasi memang tidak bisa dikesampingkan akan tetapi lapisan masyarakat terbesar itulah yang harus diberi prioritas.

Konkritnya, ada anggota masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan akademis setinggi mungkin, dan ada yang secukupnya saja; di sisi lainnya ada anggota masyarakat yang justru menginginkan pendidikan vokasional secukupnya saja, dan ada pula yang setinggi mungkin. Dalam hal ini yang harus mendapatkan prioritas adalah anggota masyarakat yang terbesar.

Kalau kita membaca berbagai literatur yang ada; pengertian BBE seperti itu memang tidak sepenuhnya relevan meskipun "jiwa" dan hakekatnya tidak jauh berbeda.

Menurut literatur yang ada, BBE adalah satu sistem pendidikan yang memberikan pengetahuan, ilmu dan keterampilan kepada anak didik yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat sekitar. Sebagai misal, mengajarkan Matematika kepada siswa SLTP haruslah disesuaikan dengan keperluan masyarakat sekitarnya; misalnya un-tuk keperluan perdagangan, pertanian, perkebunan, dsb.

Pengajaran ilmu-ilmu yang lain pun juga didasarkan kepada keperluan masyarakat sekitar seperti pengajaran Ilmu Bumi, Biologi, Ilmu Pertanian, Ilmu Ekonomi, dan sebagainya. Artinya, setelah mendapatkan pengajaran di lembaga pendidikan, nota bene sekolah, maka anak didik akan mudah menerapkan pengetahuan, ilmu dan keterampilannya tersebut di masyarakat luas. Dengan metoda seperti ini maka lulusan SLTP di Badung, Bali dapat menerapkan Bahasa Inggris yang diperolehnya dari sekolah untuk melayani turis asing yang banyak "berkeliraran" di daerah tersebut; di sisi lain lulusan SLTP di Yogyakarta dapat menerapkan Bahasa Inggris yang diperolehnya di sekolah untuk menterjemahkan buku-buku berbahasa Ing-gris ke dalam Bahasa Indonesia misalnya.

Seperti itulah pengertian BBE menurut literatur yang secara kata per kata memang tidak sama persis dengan pengertian BBE yang disosialisasi oleh departemen pendidikan. Kalau BBE di dalam literatur lebih memfokuskan pada konteks masyarakat sekitar maka BBE versi departemen lebih melihat pada masyarakat Indonesia se-cara keseluruhan; meski hakekat keduanya sama saja.

Melihat Arah

departemen pendidikan kita merupakan kebijakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan yang sepenuhnya di-peruntukkan bagi lapisan masyarakat yang terbesar di negara kita. Persoalannya sekarang adalah, ke arah mana sesungguhnya aspirasi masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan pendidikan. Dalam hal ini departemen menyimpulkan bahwa sebagian besar lapisan masyarakat kita dalam hal pendidikan sekolah tidak memerlukan atau pun tidak berorientasi ke jalur pendidikan akademik. Sebaliknya kebutuhan riil atau aspirasi masyarakat terbesar kita adalah pendidikan yang menekankan kepada kecakapan dan keterampilan hidup untuk bekerja. Atau, secara teknis filosofis orientasi pendidikan mereka adalah kepada *life skills*.

Indikator apakah yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tak memerlukan pendidikan akademis sampai jenjang yang setinggi mungkin? Salah satu indikatornya adalah rendahnya jumlah lulusan SMU yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi, hanya sekitar 12 persen; padahal lulusan SMU tersebut dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Tim Desentralisasi Komnas Pendidikan mempunyai pengalaman yang cukup menarik; yaitu ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah seperti di Biak dan Manokwari Irian Jaya, Mataram Barat dan Mataram Timur NTB, Pati Jawa Tengah, Kutai Timur dan Bontang Kalimantan Timur, Tanah Datar Sumatera Barat dsb, men-dapatkan masukan tentang pentingnya pemberian keterampilan kerja kepada para lulusan SD dan SLTP yang tidak sanggup melanjutkan studi ke lembaga pendidikan di atasnya.

Memang di lapangan dapat kita saksikan dengan mata kepala bahwa di mana-mana "berserakan" lulusan SD dan SLTP yang tidak bisa melanjutkan studi ke satuan pendidikan di atasnya. Mereka ini umumnya juga tidak atau belum bekerja. Apabila tingkat partisipasi pendidikan SLTP sekarang baru mencapai angka sekitar 55 persen, itu artinya baru 55 dari setiap 100 anak usia SLTP (nota bene para lulusan SD) yang dapat bersekolah; sementara 45 anak yang lain-nya tidak dapat melanjutkan studi.

Anak-anak lulusan SD dan SLTP yang tidak dapat melanjutkan studi tersebut di daerah menjadi masalah dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan untuk bekerja. Itulah sebabnya banyak pengambil keputusan di daerah yang mengusulkan segera dibukanya kembali SLTP Kejuruan. Dengan SLTP Kejuruan ini para lulusannya dapat menggunakan keterampilannya untuk hidup di masyarakat.

Pengalaman lapangan seperti itu, meskipun tidak direncanakan sebelumnya, secara tak langsung mendukung kebijakan konsep BBE dengan memberikan kecakapan dan keterampilan kerja untuk hidup bagi lapisan masyarakat terbesar yang menginginkan.

Yang perlu diperjelas di sini, konsep *life skills*, itu sendiri tidak semata-mata berupa keterampilan dalam arti kata psikomotorik seperti menyolder, mengelas, menjahit, bercocok tanam, dsb; tetapi *life skills* mempunyai pengertian yang lebih luas karena kecakapan termasuk didalamnya, seperti kecakapan berbahasa Inggris,

Apakah konsep BBE sebagai kebijakan baru departemen pendidikan nantinya dapat berjalan sukses sampai tingkat operasional di lapangan? Mudah-mudahan demikianlah adanya !!!*****

BIODATA SINGKAT:

* Prof. Dr. Ki Supriyoko

* Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) serta
Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Indonesia